



## **PENDIDIKAN DEMOKRASI DI ERA GLOBAL**

**Nur Patmi Wulandari, Agnes Vanesia, Siti Tiara Maulia**  
Universitas Jambi  
[nupatmiwulandari@gmail.com](mailto:nupatmiwulandari@gmail.com)

### **Abstract**

*A lot of effort went into making the training ideal for everyone involved. Including realizing the embodiment of education. Democracy in education is considered necessary because it avoids the possibility of coercing the will of groups, avoids the exploitation of some political parties, and equalizes educational opportunities at all levels of society. . The democratization of the educational process must guarantee and promote academic freedom. Democracy is the foundation for the development of morality in society and the governing body for realizing the values of truth, beauty, morality and religion. Democracy can be developed by encouraging critical thinking, alternative thinking, guaranteeing freedom of thought, and being responsible for the chosen alternative.*

### **Article History**

Received: 15 Maret 2023  
Reviewed: 13 April 2023  
Published: 28 April 2023

### **Key Words**

*Democracy, Education, Freedom, Thinking*

### **Abstrak**

Banyak upaya dilakukan untuk menjadikan pelatihan ini ideal bagi semua orang yang terlibat. Termasuk mewujudkan perwujudan pendidikan. Demokrasi dalam pendidikan dianggap perlu karena menghindari kemungkinan pemaksaan kehendak golongan, menghindari eksploitasi sebagian partai politik, dan pemerataan kesempatan pendidikan pada semua lapisan masyarakat. . Demokratisasi proses pendidikan harus menjamin dan mempromosikan kebebasan akademik. Demokrasi merupakan landasan bagi perkembangan moralitas dalam masyarakat dan badan pengatur untuk mewujudkan nilai-nilai kebenaran, keindahan, moralitas dan agama. Demokrasi dapat dikembangkan dengan mendorong pemikiran kritis, pemikiran alternatif, menjamin kebebasan berpikir, dan bertanggung jawab atas alternatif yang dipilih.

### **Sejarah Artikel**

Received: 15 Maret 2023  
Reviewed: 13 April 2023  
Published: 28 April 2023

### **Kata Kunci**

*Demokrasi, Pendidikan, Kebebasan, Berpikir*

### **Pendahuluan**

Masyarakat belajar harus memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih penelitian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau falsafah bangsa. Begitu pula dengan penerapan prinsip belajar sepanjang hayat. Selama ini kebijakan penyelenggaraan pendidikan pemerintah mengarah pada upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, dan pemerintah secara konseptual telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kenyataannya masih banyak anak usia sekolah yang tidak/belum bisa menikmati pendidikan karena baik biaya, lokasi dan kesempatan karena satu dan lain hal tidak terjangkau. Kebebasan masyarakat untuk memilih kebutuhan belajar dalam semangat demokrasi pendidikan di Indonesia.

Di era globalisasi sekarang ini jalan untuk mengenyam pendidikan yang layak harus dicapai oleh rakyat Indonesia masih terasa susah, seharusnya setiap warga negara itu berhak



---

untuk mendapat pendidikan dengan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Meskipun pemerintah dalam pembiayaan pendidikan sudah mengalokasikan sebesar 20% seperti yang tertera dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “ Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”, akan tetapi dalam kenyataannya sekarang ini pemerintah belum mampu untuk mewujudkan hal itu di lapangan.

Kemajuan teknologi yang pesat memberikan dampak disegala bidang kehidupan termasuk juga bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan maju mundurnya sumber daya manusia. Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada. Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja, akan tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak didik secara menyeluruh sehingga anak menjadi lebih dewasa.

Demokrasi pendidikan merupakan suatu sistem yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam pendidikan. Peranan pendidikan dalam kehidupan kenegaraan akan banyak memberikan dimensi pembangunan karakter bangsa (nations character building). Aktualisasi karakter masyarakat dapat membentuk nilai-nilai budaya yang tumbuh pada komunitas lingkungan sosial-politik, baik dalam bentuk berpikir, berinisiatif, dan aneka ragam hak asasi manusia. Dengan demikian, pendidikan senantiasa melahirkan tata nilai kehidupan masyarakat dalam sistem kenegaraannya yang di anut oleh suatu pemerintahan. Demokrasi pendidikan bukan hanya sekedar prosedur, tetapi juga nilai-nilai pengakuan dalam kehormatan dan martabat manusia. Dalam hal ini melalui upaya demokrasi pendidikan diharapkan mampu mendorong munculnya individu yang kreatif, kritis, dan produktif tanpa harus mengorbankan martabat dan dirinya. Untuk menumbuhkan demokrasi diperlukan suatu pendidikan yang turut menunjang peningkatan kualitas masyarakat yang dapat memahami budaya demokratis, serta pendidikan yang demokratis sangat ditunjang oleh sistem kenegaraan yang demokratis. Untuk menyerasikan muatan demokrasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah,



---

diharapkan prakarsa kualitas pendidikan disamping harus memperhatikan potensi lokal yang dimiliki, juga harus mampu melihat peluang dan tantangan kebutuhan kualitas secara global.

## **METODE**

Informasi adalah data yang telah di olah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi penerimanya dan memiliki nilai bagi pengambilan keputusan saat ini atau dimasa yang akan datang (Fairuzabdi, 2021). Informasi tidak hanya dianggap sebagai sarana pengetahuan, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Bahkan manusia sangat memerlukan informasi sebelum mereka mengambil keputusan agar tepat dan sesuai yang diharapkan. Informasi ini tersebar banyak sekali, dan dapat ditemukan darimana saja, seperti dari buku, internet, sekolah, lingkungan, bahkan tempat di sekitar kita.

Di dalam penelitian, Teknik pengumpulan data memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah penelitian itu. Dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang tepat, maka dapat membantu peneliti mendapatkan sebuah data yang valid dan relevan.

Dalam artikel ini, metode yang digunakan ialah metode Studi Literatur. Metode studi literatur ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian (Fadli, 2021). Data yang akan digunakan untuk mengumpulkan data adalah data sekunder, yaitu data yang didapat melalui buku-buku, jurnal, skripsi maupun berita. Setelah data-data tadi dikumpulkan, lalu akan ditinjau lebih lanjut agar dapat disusun Kembali.

## **Pembahasan**

Awal abad ke-6-3 SM Pada zaman Yunani kuno, demokrasi dicapai melalui sistem demokrasi langsung, suatu bentuk proses pemerintahan di mana semua warga negara berhak mengambil keputusan politik secara langsung. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan dan kratain artinya dominasi. Demokrasi dapat diartikan ulang sebagai "aturan rakyat". Dengan kata lain, demokrasi, seperti yang dikatakan Abraham Lincoln, adalah pemerintahan yang secara langsung atau tidak langsung (melalui perwakilan) dipimpin oleh rakyat, dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat).

Demokrasi memiliki bentuk yang didefinisikan sebagai program dan sistem politik abad pertengahan akhir, bentuk pemikiran politik tentang keberadaan hak-hak rakyat. Agar



---

lebih efektif mengamankan hak politik rakyat, muncul gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintah melalui konstitusi (perjanjian) tertulis maupun tidak tertulis agar tidak sewenang-wenang. Gagasan ini disebut konstitusionalisme dan dikenal dengan negara hukum atau rule of law. Pasal klasik memiliki empat unsur negara hukum.

(1) adanya hak asasi manusia; (2) adanya pemisahan kekuasaan atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak tersebut; (3) adanya undang-undang atau peraturan pemerintah yang berdasarkan undang-undang; dan (4) keberadaan pengadilan tata usaha negara hak asasi manusia. .

Menurut Zamroni (2001), demokrasi adalah cara hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua bangsa. Sadiman (2001), di sisi lain, berpendapat bahwa demokrasi meletakkan dasar bagi kebebasan dan kesetaraan individu, terlepas dari ras, agama atau bahasa. Menurut Kusuma (2001), istilah demokrasi telah muncul dan digunakan dalam kajian politik. Dengan kata lain, kekuasaan ada di tangan rakyat, dan sementara mekanisme demokrasi dalam politik tidak persis sama dengan yang ada di lembaga pendidikan, substansi demokrasi adalah: Semangat pendidikan baik dalam perencanaan, manajemen, dan evaluasi.

Demokrasi pada dasarnya adalah pemilihan orang-orang yang berdaulat, diberdayakan untuk mengontrol pemerintah negara dan meminta pertanggungjawaban orang. Demokrasi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab 3 Pasal 5 yang mengatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. .

### **Demokrasi dari Perspektif Pedagogis**

Demokrasi secara terminologi adalah pemerintahan oleh rakyat, dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, dan dipimpin langsung oleh rakyat atau oleh wakil-wakilnya yang dipilih secara bebas. Prinsip utama demokrasi adalah: (a) pemerintahan oleh rakyat; (b) pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah; (c) mayoritas mayoritas; (d) hak minoritas; , adalah. (f) pemilihan umum yang bebas dan jujur; (g) kesamaan di depan hukum; (h) proses hukum yang semestinya; (i) batasan konstitusional terhadap pemerintah; prinsip, (k) nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, konsensus.



Demokrasi pada dasarnya mengakui semua warga negara sebagai individu unik yang dibedakan oleh kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Demokrasi menawarkan berbagai kesempatan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi setiap individu, baik jasmani maupun rohani. Demokrasi juga mengakui bahwa semua individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, pendidikan yang dimodifikasi adalah pendidikan yang memandang siswa sebagai individu yang secara unik berbeda satu sama lain, dan yang potensinya harus disadari dan dikembangkan secara maksimal. Untuk itu, pendidikan modifikasi harus memberikan layanan yang berbeda kepada siswa sasaran yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Termasuk dalam pendidikan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pendidikan revisi juga memerlukan partisipasi aktif siswa dan guru dalam perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Keterlibatan orang tua dan masyarakat juga sangat penting dalam perancangan, pengembangan dan pelaksanaan proses pendidikan. Demokrasi dalam pendidikan adalah tentang mengakui individu siswa sesuai dengan martabatnya sendiri, karena demokrasi pada dasarnya adalah kodrat dan manusiawi. Artinya, peneliti yang terlibat dalam proses pendidikan perlu mengenali dan menilai keterampilan dan karakteristik individu siswanya. Tidak ada unsur paksaan atau tekanan kepada siswa untuk tidak menjunjung tinggi martabatnya. Oleh karena itu demokrasi mengandung arti saling menghormati, saling menghormati, perilaku toleransi terhadap orang lain, termasuk pengendalian diri dan tidak mementingkan diri sendiri. Dalam proses pendidikan, semua pihak yang terlibat menyadari sifat atau suasana saling menghargai, yaitu antara guru dengan guru, antara guru dengan siswa, dan antara guru. Bersama orang tua dan anggota masyarakat lainnya.

Demokrasi dalam pendidikan dan pembelajaran menggunakan gagasan kesempatan yang sama untuk semua. Artinya, siswa mendapat kesempatan yang sama dalam menerima kesempatan pendidikan dan perlakuan. Guru memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mengikuti setiap kegiatan pendidikan. Dalam hubungan antara pendidikan dan demokrasi terdapat dua pendapat yang saling bertentangan. Pertama, muncul di lingkungan demokrasi liberal yang menentang sekolah yang digunakan sebagai instrumen sosialisasi politik yang menguntungkan mereka yang berkuasa. Sebab pendidikan akan menghasilkan lulusan yang tidak memiliki kemandirian dan cenderung



menjadi robot. Menurut kelompok ini, pendidikan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mengembangkan karakter demokratis, meningkatkan daya kritis, mendorong semangat menuntut ilmu dan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kedua, menyatakan bahwa pendidikan merupakan instrumen untuk mengembangkan kesadaran, sikap dan perilaku politik dengan harapan peserta didik menjadi warga negara yang baik. Dalam pandangan ini, pendidikan sebagai alat sosialisasi politik merupakan realitas yang tidak perlu lagi dihindari. Saat ini tidak ada satu negara pun yang tidak menggunakan pendidikan sebagai instrumen sosialisasi politik, bahkan di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pejuang demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka masih menjadikan pendidikan sebagai alat indoktrinasi politik. Buku pelajaran PKn selalu menekankan bahwa sistem kapitalis adalah yang terbaik dan sistem lainnya adalah yang terburuk. Begitu juga di setiap bukunya dipaparkan bahwa kehidupan negara berkembang masih sangat terbelakang.

Demokrasi dan pendidikan sebenarnya saling berkaitan dan memiliki hubungan timbal balik. Misalnya, jika pendidikan diartikan sebagai proses pendampingan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, maka pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis (sering disebut dengan demokrasi pendidikan). Pendidikan modifikasi ditandai dengan suasana belajar yang mampu menumbuhkan potensi peserta didik secara optimal untuk tujuan tertentu. Begitu pula sebaliknya, agar peserta nilai - demokrasi (hak asasi manusia), kebebasan, keadilan, kesetaraan dan penyelesaian) dipahami dan dididik, diperlukan pendidikan. Pendidikan ini berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada siswa (pendidikan demokrasi atau pendidikan tentang demokrasi).

### **Mewujudkan Demokrasi Melalui Pendidikan**

Pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas, jalur sekolah, luar sekolah dan keluarga. Pendidikan sekolah sendiri terdiri dari tahapan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Untuk mewujudkan demokrasi di dalam dan melalui sekolah, menurut John Dewey (2004), sekolah harus menjalankan tiga fungsi berikut, (1) sekolah harus menyediakan lingkungan yang disederhanakan dari kompleks budaya yang ada, yang dipilih dari aspek fundamental yang dapat dimiliki siswa. menyerap, (2) sekolah sedapat mungkin menghilangkan hal-hal yang tidak baik dari lingkungan yang ada, meniadakan hal-hal yang



---

sepele dan tidak berguna dari masa lalu dan memilih yang terbaik dan memungkinkan anak menjadi warga negara yang lebih baik dan membentuk masyarakat masa depan yang lebih baik, maju dan sejahtera , (3) sekolah periklanan menyeimbangkan berbagai elemen dalam lingkungan sosial dan mengupayakan agar setiap individu memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari batasan kelompok sosial tempat ia dilahirkan.

Konsep ini sesuai dengan paradigma pendidikan sistematis organik yang menyatakan bahwa proses pendidikan formal dalam sistem persekolahan harus memiliki empat ciri sebagai berikut:

- (1) Pendidikan lebih menekankan pada proses belajar daripada mengajar,
- (2) Pendidikan diselenggarakan dalam struktur yang fleksibel,
- (3) Pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki ciri khusus dan mandiri dan
- (4) Pendidikan merupakan proses yang irasional dan selalu berinteraksi dengan lingkungan. Dengan demikian, perwujudan sekolah yang mensosialisasikan pemahaman dan sikap yang dimodifikasi, sebagaimana ditulis oleh Zamroni (2001), dapat dikaji berdasarkan dua aspek:

(1) aspek status peserta didik, berorientasi pada pendidikan modern yang memiliki anggapan bahwa pendidikan berlangsung dari lahir sampai mati. Jadi sekolah adalah hidup itu sendiri, sebaliknya hidup adalah sekolah atau pendidikan. Oleh karena itu, sekolah adalah kehidupan aktual siswa itu sendiri, bukan tempat mempersiapkan siswa untuk masa depan. adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk hidup).

(2) aspek fungsi guru: yaitu bahwa guru sebagai fasilitator dan motivator. Fungsi guru ini akan muncul jika siswa berstatus sebagai subyek dalam proses pendidikan, karena sebagai fasilitator dan motivator guru akan lebih bersifat tut wuri handayani dengan memberikan dorongan dan motivasi agar siswa dapat memperluas kemampuan pandang untuk mengembangkan berbagai alternatif dalam aktivitas kehidupan dan memperkuat emosi untuk mendalami serta mengembangkan apa yang telah dipelajari dalam proses pendidikan.



## **Membangun sistem pendidikan yang demokratis**

Cita-cita pendidikan yang baik hanya dapat diwujudkan dalam bidang demokrasi pendidikan, dan demokrasi pendidikan hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat, negara, dan kehidupan berbangsa yang demokratis. Kenyataannya, kehidupan demokrasi masih lebih merupakan cita-cita daripada kenyataan. Konsep sistem pendidikan yang dimodifikasi mengacu pada bagaimana pendidikan dipersiapkan, dirancang dan dikembangkan untuk memungkinkan terwujudnya karakteristik atau nilai demokrasi. Hal yang sama juga dalam arti sistem pendidikan dikemas dengan segala komponennya seperti kurikulum, bahan ajar, sarana prasarana, lingkungan siswa, guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta proses pendidikan. Itu bisa spesifik. Artinya, pengemasan komponen-komponen tertentu dari sistem pendidikan. Misalnya, bagaimana kurikulum dan bahan ajar, proses belajar mengajar dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan dan memungkinkan terbentuknya nilai-nilai demokrasi. Membangun sistem pendidikan demokrasi di Indonesia harus berpegang pada tujuh butir prinsip prosedural yang mengkomunikasikan dan mencerminkan pandangan dan metode demokrasi yang diinginkan. 7 poin:

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat; (2) tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain;
- b. mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan demi kebaikan bersama; dan
- c. mencapai mufakat dalam semangat kekeluargaan.
- d. Beriman dan rasa tanggung jawab untuk menerima dan bertindak atas hasil keputusan musyawarah yang baik;
- e. Musyawarah berdasarkan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang baik; dan
- f. Keputusan dibuat oleh Tuhan Yang Maha Esa. bertanggung jawab secara moral Mahakuasa, pertahankan harkat dan martabat manusia, kebenaran dan keadilan.



---

## **Demokrasi Pendidikan di Indonesia**

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31(1) UUD 1945, hak setiap anak di negara untuk mengenyam pendidikan diakui secara efektif oleh undang-undang, dan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. telah. Oleh karena itu, tanggung jawab mendidik masyarakat melalui pendidikan berada pada seluruh rakyat, termasuk orang tua, masyarakat dan pemerintah. Tentang tanggung jawab Pemerintah, Pasal 31(3) UUD 1945 mewajibkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang memperkuat keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia yang terkait dengan pendidikan kehidupan rakyat yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. dinyatakan secara khusus.

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, sejak tanggal 8 Juli 2003, Pemerintah telah mengesahkan UU RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU No. 20 Tahun 2003.2 sejak tahun 1989 dan dianggap sudah tidak berfungsi lagi. Pembaruan Sistem Pendidikan Nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. UU No 20/2003 jelas memperkuat kekuatan Pasal 31 UUD 1945 tentang pendidikan.

Secara retorik, kedua ayat ini cukup memenuhi tuntutan reformasi pendidikan, kemungkinan memberikan kebebasan kepada keluarga dan masyarakat, bahkan dalam batas-batas tertentu. Dilatih dan diatur sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat, dan kondisi kerja dan pekerjaan; Artinya intervensi negara yang berlebihan dalam penyelenggaraan pendidikan setidaknya harus dikurangi, atau fakta-fakta yang sudah tidak relevan perlu diperhatikan. Sejak kemerdekaannya, Indonesia menganut dan mengembangkan demokrasi di bidang pendidikan hingga saat ini. tersedia dari :

1. Pasal 31 (1) dan (2) UUD 1945.



---

2. Pasal 2, 5, 6, 7 dan 8, ayat 1, 2 dan 3, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Ringkasan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.

### **Pentingnya Kepemimpinan Demokrasi dalam Pendidikan di Indonesia**

Praktik kepemimpinan transformasional memberdayakan guru (termasuk guru bahasa dan sastra Indonesia) untuk melihat dirinya secara positif, lebih menerima diri sendiri dan orang lain, serta memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengidentifikasi diri dengan teman sebayanya. Dirancang untuk menggunakan metode kepemimpinan demokratis dalam pendidikan, guru mengembangkan ruang kelas dengan cara yang demokratis, menekankan kegiatan kolaboratif sambil menghormati kebutuhan, inklusi, dan potensi semua anggota kelas. Saya bisa. Kelas semacam itu memberikan banyak peluang untuk sukses dan pencapaian kreatif. Di era globalisasi, perhatian lebih diberikan pada kepemimpinan. Guru yang telah mengalami lingkungan kerja yang demokratis cenderung menciptakan suasana yang sama di kelasnya. Analisis berkelanjutan dan restrukturisasi nilai-nilai demokrasi sangatlah penting, karena hasilnya menentukan masa depan tertutup.

### **KESIMPULAN**

Demokratisasi pendidikan adalah kebijakan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Melalui kebijakan ini, diharapkan kesempatan masyarakat untuk menikmati pendidikan akan lebih selaras dengan keterampilan dan kesempatan yang dimiliki. Kesenjangan antara kelompok terpelajar dan tidak berpendidikan semakin menipis, dan informasi tentang pembangunan tidak lagi menjadi penghalang. Ungkapan *education for all*, *education for all* harus lebih dari sekedar wacana, melainkan harus menjadi komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkannya. Begitu pula dengan tingkat putus sekolah, elitisme, dan tidak terjangkau pendidikan dapat terhapus dengan sendirinya.

### **Daftar Pustaka**

Arifin, Syamsul. 2007. *Demokrasi dan Urgensi Pendidikan Indonesia*. Al-Wasathiyah, Vol. 02, No. 08, hal. 11-15.



**Civilia :**

**Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan**

**ISSN : 2961-8754**

<http://jurnal.anfa.co.id>

*Bulan,3Tahun 2023*

*Vol 3 , No1 .*

- 
- Dewey, John. 2004. *Democracy and Education An Introduction to the Philosophy of Education*. Delhi: Aakar Books.
- Englund, Tomas. 2000. Rethinking Democracy and Education: Towards an Education of Deliberative Citizen. *J. Curriculum Studies*, Vol. 32, No. 2, 305-313.
- Kusuma, Iskandar Wiryo. 2001. Demokratisasi Belajar dan Pembelajaran Ditinjau dari Pengalaman Empirik, (Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran di Malang tanggal 7 Oktober 2001), 2.
- Muslich, Masnur. 2010. *Bahasa Indonesia pada Era Globalisasi Kedudukan, Fungsi, Pembinaan, dan Pengembangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rositawati, Tita. 2014. Konsep Pendidikan John Dewey. *Tadbir, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 02, No. 2, Agustus, pp 133-139.
- Sadiman, Arief. S. 2001. Paradigma Baru Pengemasan Pendidikan yang Demokratis Ditinjau dari Segi Aspek Kebijakan. (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran di Malang)
- Sihono, Teguh. 2011. Upaya Menuju Demokratisasi Pendidikan. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 8, Nomor 1, April, hal. 1-22.
- Yasa, I Nyoman. 2016. Menelusuri Alam Demokrasi Pendidikan Indonesia dalam Isu Lintas Kurikulum Baru. Makalah: tidak diterbitkan.
- Zamroni. 2001 *Pendidikan Untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society*. Yogyakarta: Biograf